

IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) PADA KASUS *STUNTING* DI INDONESIA

Nurmasari Situmeang¹, Sindy Yulia Putri²

Prodi Ilmu Hubungan Internasional^{1,2}

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2}

Email: nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id¹, sindyuliyulia@upnvj.ac.id²

ABSTRACT

In 2018, the quality of Indonesian human resources was ranked 87 out of 157 countries. The good growth of Indonesian human resources, of course, starts from the womb or prenatal period, under five years of age, children, adolescents, to working productive ages. This study chose the topic of stunting, because of the urgency to improve the competitiveness of Indonesian human resources in the regional and international realms. Superior human resources are certainly formed from a long process since childhood. This paper aims to apply the concept of sustainable development goals (SDGs) as a framework adopted by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases and to provide the latest holistic analysis regarding the implementation of SDGs policies by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases. This study used qualitative research methods. The result of this research is that collaboration between state and non-state actors is needed to handle stunting cases in Indonesia. Starting from the synergy between ministries / institutions and collaboration with academics, public health scholars, companies, and foreign parties. These results are important as recommendations for each stakeholder in implementing the SDGs concept to reduce the prevalence of stunting cases in Indonesia.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs); Stunting; Indonesia

ABSTRAK

Pada tahun 2018, kualitas SDM Indonesia menempati urutan 87 dari 157 negara yang disurvei. Pertumbuhan SDM Indonesia yang baik tentu berawal dari masa kandungan/masa prenatal, masa balita, anak-anak, remaja, hingga usia produktif bekerja. Penelitian ini memilih topik stunting, karena urgensi untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia di ranah regional dan internasional. SDM unggul tentu dibentuk dari proses panjang sejak masa kanak-kanak. Tulisan ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep sustainable development goals (SDGs) sebagai kerangka kerja yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi kasus stunting dan untuk memberikan analisis holistik terbaru mengenai implementasi kebijakan SDGs oleh Pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi kasus stunting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kolaborasi antara aktor negara dan aktor non-negara sangat dibutuhkan untuk menangani kasus stunting di Indonesia. Dimulai dari sinergisitas antarkementerian/lembaga dan kolaborasi dengan akademisi, para sarjana kesehatan masyarakat, perusahaan, dan pihak asing. Hasil ini penting sebagai rekomendasi untuk setiap pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan konsep SDGs terhadap penurunan prevalensi kasus stunting di Indonesia.

Kata kunci: Sustainable Development Goals (SDGs); Stunting; Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid dua dalam Kabinet Indonesia Maju lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Visi Pemerintah Indonesia yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju”. “SDM Unggul, Indonesian Maju” bermakna, bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh ada yang mengalami ketertinggalan untuk meraih cita-citanya; Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Seiring dengan visi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya segenap tenaga untuk memajukan pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi (Kantor Staf Presiden, 2019). Indonesia dengan karakteristik unggul bisa diperoleh jika seluruh pemangku kepentingan sevara bersama-sama dengan serius bersinergi untuk mendorong pembangunan kapabilitas SDM demi bersaing di ranah global dan semakin diperhatikan oleh komunitas internasional. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, tentu sokongan dari berbagai pihak yang terlibat akan sangat membantu kinerja pemerintah. Merujuk pada data yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia berada di posisi ke-87 dari 157 negara yang menjadi peserta survei untuk kategori kualitas SDM. Selanjutnya, *Business World* melaporkan, bahwa di tahun yang sama, daya saing Indonesia menempati peringkat 45 dari 63 negara yang disurvei. Peringkat ini dapat dikatakan masih tertinggal dengan dua negara jiran, yakni Singapura di peringkat 13 dan Malaysia di peringkat 22 (Kementerian Sekretariat Negara, 2019).

Terkait dengan *sustainable development goals* (SDGs), Pemerintah Indonesia telah mengagendakan tujuh agenda pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024, yaitu (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019). Realitanya, pembangunan SDM memiliki linearitas dengan fenomena *stunting*. Di dalam *Global Nutrition Report 2016* termaktub, bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia menempati urutan 108 dari 132 negara partisipan. Ironisnya, di kawasan Asia Tenggara, angka prevalensi *stunting* Indonesia adalah angka tertinggi kedua setelah Kamboja. Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum untuk mengatasi masalah *stunting*. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu: 1) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; 2) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 4) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kemudian Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa

status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun (TNP2K Kementerian PPN/Bappenas, 2018:12).

Lebih jauh lagi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini didasari oleh agenda *sustainable development goals* (SDGs) yang diusung oleh berbagai negara maju, berkolaborasi dengan *United Nations* (PBB). TPB/SDGs sejatinya bertujuan untuk menjaga eskalasi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kontinu, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang dapat menjaga eskalasi kualitas kehidupan di tiap generasi. Upaya akselerasi perbaikan gizi secara fundamental merupakan bagian dari TPB tujuan kedua, ialah memutus rantai kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan akses untuk perolehan nutrisi yang lebih mumpuni dan mendukung ragam aktivitas pertanian secara berkelanjutan. Mengacu pada perpres dan kebijakan pembangunan yang tertera di Bappenas, *stunting* menjadi prioritas skala nasional. Berkaitan dengan TPB/SDGs, anak-anak memperoleh pelayanan kesehatan, gizi, air minum dan sanitasi, pendidikan, pertanian, dan proteksi sosial. Lebih jauh lagi, Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mensinergikan antarkementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristekdikti, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, BKKBN, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hingga Kementerian Perdagangan, untuk mencapai tujuan nomor dua dari SDGs (TNP2K Kementerian PPN/Bappenas, 2018:13-15).

Pertumbuhan SDM Indonesia yang baik dan terhindar dari *stunting* akan mendukung rencana pembangunan nasional Pemerintah Indonesia untuk menciptakan SDM Unggul. SDM unggul dapat dibentuk dari pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, usia balita, hingga usia produktif untuk bekerja. Jika SDM Indonesia unggul, bangsa Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di skop regional dan internasional, terlebih di era revolusi industri 4.0. Namun pada dasarnya, pemerintah membutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus *stunting*. Di studi hubungan internasional (HI) terdapat beberapa unit analisis yang dapat terlibat dalam suatu masalah, mengingat kasus *stunting* merupakan *cross-cutting issues* yang lintas sektoral. Yurdusev (1993) mengklasifikasikan beberapa unit analisis dalam HI, yaitu individu dan institusi sebagai aktor, kelompok sosial, dan masyarakat luas (*inclusive actor*). Maka tulisan ini akan

mengelaborasi sinergisitas K/L di Indonesia dan kemitraan Pemerintah Indonesia dengan berbagai aktor non-negara seperti para akademisi (universitas dan para sarjana), korporasi, dan lembaga asing dalam menurunkan prevalensi kasus *stunting* di Indonesia dengan mengacu pada konsep *sustainable development goals* (SDGs).

II. PEMBAHASAN

Tulisan ini akan dianalisis dari konsep SDGs dan *stunting* dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Konsep SDGs dan *stunting* juga dikaitkan dengan studi hubungan internasional, di mana terdapat para aktor, baik aktor negara dan aktor non-negara yang terlibat dan saling berkolaborasi untuk mencegah *stunting* di Indonesia.

2.1. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) berawal dari disepakatinya dokumen *The Future We Want* dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. SDGs merupakan program keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Program ini rencananya akan berakhir di 2030. PBB beserta negara-negara *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) merumuskan 17 tujuan dan 169 sasaran, berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran (*United Nations*, 2020 dan ITC-ILO, 2018).

Pada dasarnya, implementasi SDGs terdiri dari dana/anggaran, alih teknologi, dan pengembangan kapabilitas atau kompetensi. Beberapa elemen krusial dalam implementasi SDGs berfokus pada berbagai bidang, seperti (ITC-ILO, 2018):

- a. Strategi SDGs di tingkat nasional yang dibantu oleh pergerakan dan optimalisasi SDA secara lebih efisien dan efektif.
- b. Alokasi dana internasional untuk membantu upaya nasional, termasuk dari beragam bentuk bantuan seperti *official development assistance* (ODA). Beragam negara donor telah berkomitmen untuk memperoleh target 0,7% PDB di berbagai program ODA dan 0,15% sampai 0,2% dari GNI ke berbagai negara berkembang dan negara yang tidak berkembang (LDCs).
- c. Kegiatan perdagangan global sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi inklusif dan meminimalisir kemiskinan.
- d. Tersedianya mekanisme transfer dan alih teknologi yang lebih kondusif dan ramah lingkungan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dan lebih baik.

Jika dikaji dari studi hubungan internasional, konsep SDGs merupakan konstruksi dari berbagai interdisiplin ilmu, mulai dari studi pembangunan, relasi antarnegara, relasi antarbangsa, peran *state* dan *non-state* dalam pembangunan, globalisasi, *transfer of knowledge* (ToK), *transfer of technology* (ToT), dan ekonomi politik internasional. Dengan demikian, unit analisis SDGs juga beragam, mulai dari pemerintah/*state actor*, lobi kepentingan, *non-state actor*, aktivis, hingga individu.

2.2. Fenomena *Stunting*

Stunting merupakan suatu kondisi sulit/gagal tumbuh pada anak balita dikarenakan kekurangan gizi kronis, sehingga anak tumbuh tidak sesuai usianya atau dengan kata lain terlalu pendek di usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan di awal usia bayi lahir dan kondisi ini akan semakin terlihat di usia 2 tahun. Di Indonesia, 37% atau sekitar hampir 9 juta balita mengalami *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2013). Bahkan Indonesia merupakan negara yang memiliki prevalensi *stunting* kelima paling tinggi di Asia Tenggara. Balita yang mengalami *stunting* lebih potensial memiliki tingkat kecerdasan yang tidak optimal dan lebih rentan dengan berbagai penyakit. Kemudian, mereka juga akan menjadi tidak produktif di usia pekerja nantinya. Hingga akhirnya secara garis besar, *stunting* dapat menjadi kendala pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, berpotensi semakin mengeskalasi tingkat kemiskinan, dan melebarkan disparitas atau kesenjangan sosial di masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018 Provinsi Indonesia dengan angka *stunting* tertinggi ialah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah dengan nilai terendah ialah Bali. Bahkan Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) tidak terbebas dari *stunting*. Meskipun berada pada peringkat empat terbawah, terdapat 22,7% dari total penduduk Jakarta yang mengalami *stunting* (Kementerian Kesehatan, 2018).

2.3. Upaya Pemerintah Indonesia Menangani *Stunting* melalui Sinergisitas Kementerian dan Lembaga di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan koordinasi dan sinergisitas beberapa kementerian yang turut berkontribusi dalam meminimalisir kasus *stunting* di Indonesia. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor (berdasarkan PMK No. 61/PMK.07/2019) merujuk dari pedoman di tingkat nasional,

Bappenas di tingkat kabupaten-kota, dan Kemendesa PDTT di tingkat desa. Ada 23 K/L yang berkolaborasi untuk akselerasi reduksi *stunting* di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, TNP2K, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Negara, Koperasi, dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristekdikti, Kemendesa, BPOM, dan sebagainya (Satriawan, 2018:7-8).

Kementerian Kesehatan RI sebagai garda terdepan dalam menangani kasus *stunting* telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia, meliputi intervensi gizi secara spesifik, mencakup suplementasi gizi makro dan mikro seperti berbagai jenis vitamin, sosialisasi kepada para ibu untuk implementasi ASI secara eksklusif, makanan pendamping ASI, fortifikasi¹, kampanye mengenai pentingnya gizi seimbang, pembukaan kelas untuk ibu hamil, penanganan kekurangan gizi, dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kementerian Kesehatan juga melakukan pemberian bahan pangan bergizi, memperluas cakupan daerah, dan menerima berbagai program bantuan sosial, bantuan pangan non tunai (BPNT), dan tentunya bantuan pangan. Kementerian kesehatan menekankan, bahwa permasalahan *stunting* di Indonesia seyogyanya diselesaikan dengan komprehensif, holistik, dan terintegrasi dengan beragam sektor dengan melibatkan berbagai K/L. Seperti pada program fortifikasi, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian di tingkat pusat dan Dinas Perindustrian yang menangani di tingkat provinsi, lalu kabupaten, dan kota agar bahan makanan tambahan dapat sampai kepada seluruh masyarakat di provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, BPOM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aktivitas pengawasan ini dimulai dari pengawasan keamanan dan mutu pangan, penegakan hukum mengenai labelisasi halal, dan iklan mengenai kebutuhan pangan (TNP2K Kementerian PPN/Bappenas, 2018:37-38).

Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan K/L terkait dalam melaksanakan intervensi gizi sensitif. Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur sanitasi. Kementerian Desa dan PDTT memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana desa untuk membangun infrastruktur dasar guna memperbaiki

¹ Penambahan gizi pada makanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pangan suatu kelompok masyarakat, seperti fortifikasi garam, tepung terigu, dan minyak goreng serta biofortifikasi.

kehidupan masyarakat, dengan membangun 30 ribu unit sumur, 37 ribu unit air bersih, 108 ribu unit MCK, lima ribu unit polindes, dan 11 ribu unit posyandu di desa seluruh Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas juga menekankan perlu adanya kesadaran publik terhadap isu *stunting*. Bappenas menghimbau sinergitas antarlembaga dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan kompleksitas masalah *stunting* cukup tinggi, sehingga akses untuk berbagai layanan dasar mesti diperhatikan. Lebih elaboratif lagi, *stunting* juga berimplikasi pada kerugian ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas dan *World Bank*, sekitar 30% balita di Indonesia menderita *stunting*. Sementara dari sisi Kementerian Agama, pengetahuan yang cukup seharusnya dimiliki oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah. Para pasutri harus mempelajari lebih elaboratif bagaimana manajemen rumah tangga, terutama mendidik anak dan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Kemudian, jika ditelaah dari konsep SDGs, kasus *stunting* dikaji dari sisi ekonomi dan sosial. Pembiayaan pencegahan *stunting* diperoleh dari Kementerian Keuangan dan koordinasi antarkementerian dan lembaga yang juga menyediakan anggaran untuk mencegah *stunting*. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah memberdayakan APBN, APBD, dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan lain yang diatur oleh pemerintah. Berbagai korporasi juga memiliki dana CSR berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Sementara *Civil Society Organization* (CSO) dan individu dapat terlibat untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan, seperti skema *in-cash* dan *in-kind* mencakup bantuan penyediaan lahan, bantuan barang, tenaga, dan lain-lain. Pembiayaan juga didapat dari pihak asing yang memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah (*grant*) dan bantuan teknis. CSO sejatinya sudah berkontribusi di berbagai aktivitas sosialisasi dan diseminasi dan mendirikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs. Berbagai CSO berkolaborasi dengan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) sudah melaksanakan aktivitas advokasi untuk mendukung penurunan angka *stunting* di Indonesia (Panuluh & Fitri, 2016:18).

2.4. Peran Sivitas Akademika dalam Mencegah *Stunting*

Dari sudut pandang akademisi, dua universitas dalam negeri juga memfokuskan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk berkiprah dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Untuk menyokong implementasi SDGs di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan keterampilan SDM, UIN Sunan Kalijaga telah menyusun kurikulum relevan, mendirikan berbagai pusat studi, dan juga mendirikan *dialog centre*. Beragam upaya

tersebut bisa lebih memperkuat diskusi SDGs inklusif, progresif, dan tidak diskriminatif. Melalui perluasan jaringan yang baik, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta turut memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi SDM dengan mengalokasikan sejumlah biaya untuk menyokong implementasi SDGs. Selanjutnya UGM juga mencetuskan dirinya sebagai *Socio Entrepreneur University* agar dapat mengimplementasikan berbagai program SDGs agar lebih bermanfaat untuk masyarakat (Panuluh & Fitri, 2016:16-17).

Untuk di dalam negeri, peran Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) juga sangat besar di gerakan *scaling up nutrition* demi menyelamatkan 1000 hari pertama bayi pasca lahir. SKM menjadi tonggak tenaga kesehatan di kasus *stunting*, karena mereka juga dekat dengan masyarakat. Merujuk pada *SUN framework*, peran SKM sangat dibutuhkan untuk para ibu. SKM juga bisa berkontribusi di beragam bidang kesehatan masyarakat, yakni kesehatan lingkungan, epidemiologi, gizi, promosi kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, biostatistik, dan terakhir kependudukan. Dalam *nutrition-specific intervention*, SKM memiliki kemampuan untuk mendesain, merencanakan, dan juga menyelenggarakan beragam program untuk menyelesaikan masalah gizi di kalangan remaja, fortifikasi, suplementasi, dan sosialisasi mengenai aneka ragam makanan bergizi, prakonsepsi, hingga keluarga berencana (Sumarmi, 2015:6).

Selanjutnya, program pendidikan dan perkembangan anak usia dini juga membutuhkan peran guru, psikolog, dan sektor sosial seperti NGO yang berfokus pada perlindungan HAM dan anak. Mengingat gerakan penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan dilakukan dengan pendekatan multi sektor, maka kemampuan SKM dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan terpadu (*integrated planning*) sangat diperlukan. Kemudian, sistem layanan terpadu pra-nikah (laduni) juga diperlukan untuk memfasilitasi pelayanan pra-nikah yang menyeluruh untuk calon pengantin, termasuk pelayanan kesehatan, konseling rumah tangga, dan urusan administratif. Laduni dikembangkan untuk meminimalisir angka kematian ibu dan bayi, prevalensi berat rendah pada bayi, dan penyakit anemia untuk para ibu hamil. *Pilot project* ini disusun dengan sokongan finansial dari Bappeda Kabupaten Probolinggo dan diselenggarakan di 9 kecamatan di kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. System ini juga semakin memperkuat peran Departemen Agama, dari ranah desa dengan melibatkan petugas KUA dan petugas pencatat pernikahan (P3N) (Sumarmi, dkk, 2014:8).

2.5. Peran Institusi Asing dalam Mencegah *Stunting*

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan aktor non-negara lain, yakni MNC. Indonesia bermitra dengan PT Holland for Water (NAZAVA) dan *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) yang diprakarsai dari September 2014. PT Holland for Water (HfW) merupakan perusahaan sosial yang berdiri tahun 2009 di Aceh dan memiliki kantor di Cimahi, Jawa Barat. Perusahaan ini menyediakan air layak minum dengan harga terjangkau di seluruh kalangan. Kemudian, ia juga memproduksi dan menjual Nazava, yaitu saringan air untuk filterisasi air hujan, air sumur, dan air PDAM tanpa perlu dimasak sebelum diminum. Sejak didirikan hingga Mei 2016, HfW telah menyediakan air minum sehat untuk 250 ribu orang Indonesia melalui 122 *reseller* dari 100 lokasi yang ada di 70 kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa mitra HfW ialah Plan International, Palang Merah, Kopernik, dan ACTED (NGO Perancis) (CCPHI, 2016:1-2). Sementara *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) adalah NGO internasional bentukan PBB di tahun 2002, dengan tugas utama mengatasi permasalahan malnutrisi global. GAIN sudah menjangkau lebih dari 750 juta orang di 30 negara dengan beragam program perbaikan gizi inovatif. Salah satu strategi GAIN ialah mendukung jalinan kemitraan pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses dan ketersediaan produk gizi untuk masyarakat rentan. GAIN juga membantu implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. HfW dan GAIN mempunyai perhatian lebih terhadap status gizi di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan ketersediaan air minum bersih dan layak. Keduanya bekerja sama merealisasikan “Program Baduta: Bagaimana Air Bersih Membantu Mengurangi *Stunting* (Balita Pendek)”. Realisasi program dilakukan di 6 kecamatan, yakni 3 di kabupaten Malang dan 3 di kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang diselenggarakan yaitu asesmen air masyarakat, pendidikan mengenai *Household Water Treatment and Safe storage* (HWTS), dan peningkatan kualitas air untuk 125 ribu orang. Selanjutnya, mereka membentuk rantai pasokan berkelanjutan dari filter air rumah tangga melalui wirausahawan filter air untuk 30 ribu orang dengan air minum aman. Mereka juga membangun sistem air masyarakat untuk seribu rumah tangga. Hasil yang dicapai dari program baduta hingga penghujung tahun 2016 ialah 2.000 ibu kader desa dan 20 ribu mendapatkan pelatihan air minum sehat dan aman untuk ibu dan anak dan pelatihan rantai suplai teknologi air minum sehat untuk 80 wirausaha, dengan proporsi 95% dari peserta merupakan perempuan (CCPHI, 2016:2-3).

III. KESIMPULAN

Masalah anak kerdil (*stunting*) seyogyanya menjadi masalah bersama, tidak hanya Kementerian Kesehatan. Berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah juga

perlu bersinergi untuk menangani masalah *stunting*. Terlebih lagi dari perspektif hubungan internasional, beragam aktor non-negara dapat berpartisipasi dalam kasus *stunting*. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan melalui alokasi dana CSR, sivitas akademika dan alumni berbagai universitas di Indonesia, dan juga donor dari pihak asing berupa bantuan luar negeri berbentuk hibah dan bantuan teknis. Hal ini menunjukkan, bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk meminimalisir prevalensi kasus *stunting*. Penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai *stunting* dari perspektif ilmu hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bryman, Alan. *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press. 2012

Evera, Stephen Van. *A Guide to methods for students of political science*. London: Cornell University Press. 1997.

Jurnal dan Sumber Online:

“About the Sustainable Development Goals”. United Nations. 2019, diakses melalui <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

Diah, Riski H. “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Research Gate. Mei 2018.

“Dimana Provinsi dengan *Stunting* Tertinggi 2017?”. Databoks, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017>

“Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia”. Komnasham 2019, diakses melalui <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-2.pdf>

“Menteri Bambang Dorong Sinergisitas Antar Lembaga Percepat Turunkan *Stunting*”. Kementerian PPN/Bappenas. 2018, diakses melalui <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-dorong-sinergisitas-antar-lembaga-percepat-turunkan-stunting/>

Panuluh, Sekar & Meila Riskia Fitri. “Perkembangan Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia”. Briefing Paper 02. INFID. Oktober 2016, diakses melalui https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf

- “Program Baduta: Bagaimana Air Bersih Membantu Mengurangi *Stunting*”. CCPHI, Agustus 2016, diakses melalui https://ccphi.org/storage/app/media/casestudy/31-CS-GAIN-Nazava_BI_16Agt.pdf
- “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024”. Kementerian PPN/Bappenas. 2020, diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf
- “SDM Unggul Indonesia Siap Bersaing di Pasar Global”. Kantor Staf Presiden. 2019, diakses melalui <http://ksp.go.id/sdm-unggul-indonesia-siap-bersaing-di-ajang-global/index.html>
- Saputri, Rini Archda & Jeki Tumangger. “Hulu-Hilir Penanggulangan *Stunting* di Indonesia”. Vol. 1 No. 1. Journal of Political Issue. Juli 2019, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/286747-hulu-hilir-penanggulangan-stunting-di-in-beb0ec40.pdf> (18/01/2020, 18:33 WIB).
- Satriawan, Elan. “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024”. Koordinator Pokja Kebijakan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) & Sekretariat Wakil Presiden RI. 22 November 2018, diakses melalui http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf (20/09/2020, 15:12 WIB).
- “Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia”. Semester I. ISSN 2088-270X, 2018. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, diakses melalui <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>
- “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil”. TNP2K Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2018, diakses melalui <http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Stranas%20Percepatan%20Pencegahan%20Anak%20Kerdil.pdf>
- Sugiarto, Eddy Cahyono. “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul”. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019, https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_men_uju_indonesia_unggul
- Sumarmi, Sri, et al. 2014a. “Preconceptional supplementation of multi micronutrient to improve maternal iron status and pregnancy outcomes”. Report. Danone Institute Indonesia and Airlangga University.
- “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030”. International Training Center-ILO. 2018, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_646001.pdf

Weber di dalam Alan Bryman. *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press. 2012.

“100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)”, diakses melalui <http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Ringkasan%20Stunting.pdf> (18/01/2020, 9:24 WIB).

Utami, Murti. “Sinergi Bersama dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi”. Kemenkes RI. 28 Maret 2018, diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180328/3925413/sinergi-bersama-intervensi-penurunan-stunting-terintegrasi/>

Yurdusev, A. Nuri. “Level of Analysis and Unit of Analysis: A Case for Distinction”, *Millennium: Journal of International Studies* (Vol.22, No.1, Spring 1993), 77-88.